



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Dispendik Kembalikan Rp 246 Juta ke Polres**

**Temuan BPK Proyek Gedung SD dan UPTD**

**SELUMA** - Setelah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Seluma mengembalikan temuan BPK RI terkait penggunaan anggaran tahun 2017, kemarin (7/8) giliran Dinas Pendidikan (Dispendik) Seluma. Total uang yang diserahkan Dispendik Seluma ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Seluma mencapai Rp 246 juta.

Uang tersebut merupakan asset recovery atas temuan BPK RI Perwakilan Bengkulu, terkait realisasi anggaran tahun 2017 untuk empat item proyek fisik. Masing-masing pembangunan gedung SD 118 oleh CV.Mahajaya dimana BPK menemukan kerugian negara KN Rp 69 juta. Lalu pekerjaan pembangunan gedung SDN 146 Seluma oleh CV.Mahajaya dengan temuan sebesar Rp 46 juta. Pembangunan gedung UPTD Sukaraja oleh CV Nayla Utama dengan besaran temuan Rp 54 juta. Terakhir, pengadaan mebel SD/MI/SDLB oleh CV. Cahaya Maras Kontruksi dengan nilai temuan sebesar Rp 77 juta.

Kapolres Seluma AKBP. I Nyoman Merthadana, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP.

Rizka Fadhilah, SH, S.Ik di dampingi Kanit Tipikor, Iptu. Denny Siregar, SH, MH membenarkan telah menerima pengembalian KN dari Dispendik dari seluruh temuan BPK di OPD tersebut.

Disampaikan Denny, masih ada dua OPD yang belum mengembalikan temuan BPK RI yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Disperindagkop UKM Seluma yang belum 100 persen mengembalikan KN. "Untuk Disperindagkop UKM Seluma masih tersisa satu item pekerjaan lagi yakni pembangunan Pasar Induk Sembayat dengan total temuan Rp 400 juta yang belum dikembalikan. Sedangkan Dinkes masih menyisakan Rp 120 juta lagi," jelasnya.

Dia juga menyampaikan kalau Polres Seluma terus berusaha agar semua temuan BPK RI atas kerugian negara dalam realisasi anggaran pembangunan tahun 2017, dapat kembali ke kas negara. Sehingga temuan ini tak berlanjut ke proses hukum, dugaan tindak pidana korupsi. "Harapan kami sesegara mungkin temuan ini ditindaklanjuti dan dikembalikan oleh dua OPD yang belum tuntas melakukan pengembalian KN. Walaupun saat ini batas waktu pengembalian tersebut belum ditetapkan oleh BPK RI," demikian Denny (aba).